

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang sedang berkembang. Perkembangan ekonomi yang dilaksanakan oleh Negara berkembang bertujuan pemerataan pembangunan ekonomi dan hasilnya kepada seluruh masyarakat. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, mengurangi perbedaan kemampuan antar daerah, struktur perekonomian yang seimbang. Kontribusi UMKM dalam perekonomian Indonesia adalah UMKM menjadi prioritas nasional dalam percepatan pembangunan. UMKM menjadi prioritas karena dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup banyak, dan menciptakan banyak lapangan kerja pekerjaan sehingga berkurangnya pengangguran (Muhrl, 2014).

Munculnya UMKM dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja terutama pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang pada umumnya bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi berskala kecil. Seiring dengan meningkatnya jumlah UMKM tersebut dan mendominasi aktivitas ekonomi daerah sehingga mencerminkan perekonomian rakyat dan berpotensi menjadi komponen yang utama melalui perkembangan UMKM sebagai penggerak pembangunan di tengah menurunnya peran usaha berskala besar pada perekonomian nasional saat ini akibat krisis ekonomi.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1, dinyatakan usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro

sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang merupakan bagian terbesar dalam perekonomian nasional, merupakan indikator tingkat partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor kegiatan ekonomi. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) selama ini terbukti dapat diandalkan sebagai katup pengaman dimasa krisis, melalui mekanisme penciptaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berarti memperkuat bisnis perekonomian masyarakat. Hal ini akan membantu mempercepat proses pemulihan perekonomian nasional dan sekaligus sumber dukungan nyata terhadap pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan proses yang sangat baik untuk membawa suatu bangsa menuju kemakmuran. Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat memperluas lapangan kerja, dimanfaatkan potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu Negara.

Pengembangan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ini merupakan sektor yang sangat diperhatikan oleh pemerintah, karena terbukti dengan seriusnya perhatian pemerintah dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Hal ini wajar saja kenyataannya UMKM sangat berpengaruh terhadap perekonomian Negara bahkan hampir sebagian penduduk Indonesia berpenghasilan dari sektor tersebut. Namun dengan adanya krisis perekonomian nasional dampak dari pandemi yang

berkelanjutan sangat berpengaruh stabilitas ekonomi nasional dengan politik yang imbasnya berdampak pada kegiatan-kegiatan usaha besar yang semakin terpuruk, sementara UMKM dan koperasi *relative* masih dapat bertahan. Dampak wabah Covid-19 kepada perekonomian dialami oleh seluruh Negara di dunia, termasuk di Indonesia mengalami dampak perekonomian yang cukup besar. UMKM dalam hal ini menjadi bagian yang sangat terpuak dalam krisis ini, memperhatikan kontribusi UMKM terhadap jumlah unit usaha, sumbangan PDB, serapan tenaga kerja, ekspor dan investasi terhadap perekonomian yang ada di Indonesia yang sangat besar. Kebijakan pemerintah tersebut juga bagi dalam berbagai strategi jangka pendek, menengah dan jangka panjang, antara lain jangka pendek dan mendesak, pemerintah berfokus pada pengurangan penambahan korban jiwa Covid-19 dengan penekanan pada stimulus sektor kesehatan dan bantuan kesejahteraan bagi rakyat yang terdampak, dan untuk kebijakan jangka menengah diantaranya, memastikan dunia usaha *industry* alat kesehatan, sedangkan strategi jangka panjang difokuskan pada pengenalan *industry*. Pada masa pandemi COVID-19 yang tidak ada kepastian kapan akan berakhirnya pandemi tersebut.

Dengan begitu besarnya andil UMKM dalam menopang perekonomian suatu Negara sehingga keberadaan UMKM sangat diharapkan oleh suatu Negara manapun karena perannya yang vital dalam perkembangan dan kemajuan perekonomian untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Berdirinya usaha disektor UMKM mampu menyerap jumlah angkatan kerja yang siap bekerja tetapi belum mendapat pekerjaan sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Berkembangnya pertumbuhan sektor usaha mikro semakin terburuknya kesempatan peluang kerja dan pada gilirannya dan meningkatkan

pendapatan masyarakat. Dengan jumlah pengangguran berarti sektor UMKM banyak merekrut tenaga kerja yang berarti akan membantu pemerintah dalam upaya mengurangi angka kemiskinan. Peran usaha mikro dan kecil, dan menengah (UMKM) membantu meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi dan mampu menyerap jumlah tenaga kerja dan distribusi hasil-hasil pembangunan dapat meningkatkan dirasakan oleh masyarakat. Akibat dari badai krisis ekonomi di Negara kita yang terjadi dalam beberapa waktu lalu, berdampak pada banyak usaha besar mengalami perlambatan pertumbuhan bahkan berhenti aktifitasnya.

Sementara sektor usaha mikro kecil dan menengah terbukti tetap survive dan tetap hidup dalam menghadapi krisis ekonomi. Berdasarkan pengalaman selama krisis yang telah terjadi di Indonesia tersebut, sudah sewajarnya jika pengembangan perekonomian di sektor swasta difokuskan pada pengembangan UMKM. Secara umum UMKM dalam perekonomian memiliki peran sebagai: pemeran utama dalam kegiatan perekonomian, penyedia lapangan kerja, pemain penting dalam pengembangan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat, pencipta pasar baru dan sumber inovasi, kontribusinya terhadap neraca pembayaran (Departemen Koperasi, 2008).

Bertolak dari kelima peran tersebut, maka pengembangan UMKM harus dilakukan dengan terencana, terstruktur serta secara berkelanjutan, dengan arah peningkatan produktivitas dan daya saing, serta dapat terus menumbuhkan wirausahawan-wirausahawan baru yang lebih tangguh sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kontribusi UMKM dalam suatu perekonomian juga dapat dilihat pada tabel 1.1 dan kontribusinya dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kota Ternate.

Tabel 1.1 Data UMKM,PDRB dan Tenaga kerja Kota Ternate

NO	UMKM	PDRB	TENAGA KERJA
2014	11,095	4,956,479,80	18,330
2015	11,926	5,357,318,20	19,527
2016	12,466	5,785,434,40	21,030
2017	12,795	6,222,307,40	20,743
2018	12,795	6,735,006,00	20,743
2019	13,020	7,274,904,21	20,978
2020	13,765	7,158,132,09	21,723
2021	14,210	7,341,325,36	22,168
2022	14,692	7,730,923,49	22,650
Jumlah	116,764	49.944.716,65	187,892

Sumber: Dinas Koperasi Kota Ternate,BPS Kota Ternate 2024

Dari data 1.1 diatas dapat diketahui bahwa UMKM di Kabupaten Halmahera Selatan merupakan salah satu sektor yang mampu memberikan sumbangsih terhadap PDRB sehingga dapat meningkatkan perekonomian di Kota Ternate.

Salah satu merupakan penanda yang wajib guna mengenali keadaan ekonomi disuatu daerah/regional dalam sesuatu masa tertentu ialah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik menurut ketentuan harga berlaku ataupun menurut ketentuna harga konstan. PDRB pada umumnya adalah keseluruhan nilai tambah yang didapatkan dari segala unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau menggambarkan keseluruhan nilai barang dan jasa akhir yang didapatkan oleh segala aspek ekonomi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkatan daerah (provinsi/kabupaten/kota) melambangkan keahlian suatu daerah guna menghasilkan output pada sesuatu waktu tertentu. Keduanya menyuguhkan bahan-bahan information nilai tambah dirinci bagi sumber aktifitas ekonomi (lapangan usaha) serta bagi unsur kegunaanya. PDRB dari bidang lapangan usaha ialah suatu penjumlahan dari segala unsu nilai

tambah bruto yang dapat dilahirkan dari lapangan usaha atas bermacam-macam kegiatan produksinya. Sebaliknya dari bidang penggunaan memaparkan atas pemakaian dari nilai tambah tersebut.

PDRB ialah total nilai yang dikeluarkan oleh sektor ekonomi diwilayah tersebut. Dan jumlah barang dan jasa akhir dikeluarkan oleh sektor ekonomi ditingkat nasional. Peningkatan PDRB ialah faktor kunci untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. Tetapi peningkatan PDRB belum tentu menjamin penduduk menikmati suatu kemakmuran. Namun PDRB menggambarkan kesejahteraan rakyat. Dengan meningkatnya PDRB diharapkan dapat mengurangi masalah kemiskinan bagi suatu Negara (BPS).

Dalam sebuah pembangunan suatu Negara, PDRB merupakan indikator penting pada saat pendapatan masyarakat disuatu daerah besar, maka penerimaan suatu daerah juga meningkat. Dengan demikian PDRB akan menunjukan suatu peningkatan. Sehingga dapat menyerap tenaga kerja dan penduduk miskin akan berkurang dan masyarakat akan sejahtera. Menurut Badan Pusat Statistik, ada dua cara untuk mewakili PDRB yaitu, metode berdasarkan harga saat ini dan metode berdasarkan harga tetap. 1) nilai tambah atas barang ataupun jasa yang mana dapat diukur dengan harga untuk dimanfaatkan sebagai penentuan kinerja sumber daya ekonomi serta struktur ekonomi dari wilayah itu sendiri merupakan pengertian PDRB atas harga berlaku, 2) nilai tambah atas barang ataupun jasa terhadap harga actual dari barang dalam jangka waktu satu tahun yang dimanfaatkan dalam penentuan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun merupakan pengertian PDRB atas harga konstan.

Simanjutak (2001) menjelaskan bahwa tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan melakukan kegiatan lain seperti bersekolah atau mengurus rumah tangga, dengan batasan umur 1 tahun. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat sitanggang dan Nachrowi (2004) yang menyatakan bahwa tenaga kerja adalah sebagian hwa tenaga dari keseluruhan penduduk yang secara potensial dapat menghasilkan barang dan jasa. Sehingga dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja adalah sebagian penduduk yang dapat menghasilkan barang dan jasa bila terdapat permintaan terhadap barang da jasa.

1.2 Rumusan masalah

Dari uraian latar belakang diatas, peneliti mengemukakan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah jumlah unit UMKM berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dikota Ternate?
2. Apakah PDRB berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dikota Ternate?
3. Apakah jumlah unit UMKM dan PDRB berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dikota Ternate

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah unit UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja dikota Ternate
2. Untuk mengetahui pengaruh PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja dikota Ternate

3. Untuk mengetahui pengaruh jumlah unit UMKM dan PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja dikota Ternate

1.4. Manfaat penelitian

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dalam penelitian serta wawasan baru atau memperluas ilmu pengetahuan yang ditempuh.
2. Hasil dari penelitian dapat digunakan oleh praktisi atau pemerintah untuk membuat keputusan atau kebijakan dalam mendukung dan meningkatkan UMKM,PDRB serta penyerapan tenaga kerja dikota Ternate.
3. Sebagai referensi dan bahan pembandingan bagi mahasiswa atau peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang UMKM,PDRB dan tenaga kerja.